

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERBITAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) DI KECAMATAN GALING KABUPATEN SAMBAS

Oleh:
HENDI
NIM. E01112081

Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Tanjungpura Pontianak Tahun 2016

Email : provosthendi@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk menjelaskan faktor apa saja yang mempengaruhi kinerja “Implementasi Kebijakan Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) di Kecamatan Galing Kabupaten Sambas yang belum terlaksana secara optimal. Belum optimalnya implementasi kebijakan tersebut terlihat dari timbulnya permasalahan yang ada di lapangan seperti masih banyak usaha kecil yang berada di Kecamatan Galing tidak memiliki izin usaha dari Pemerintah Kabupaten Sambas dan kurangnya pengawasan dari Pemerintah Kabupaten Sambas terhadap usaha kecil yang tidak memiliki izin usaha perdagangan. Untuk menganalisis permasalahan yang terjadi, maka penulis menggunakan teori Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti sebagai pisau analisis. Teori Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti diharapkan mampu memberikan gambaran dan penilaian sejauh mana para pelaksana kebijakan melaksanakan tujuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan tersebut. Ada enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi menurut Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti yaitu kualitas kebijakan itu sendiri, kecukupan input kebijakan, ketepatan instrumen yang dipakai untuk mencapai tujuan, kapasitas implementor, karakteristik dan dukungan kelompok sasaran, kondisi lingkungan geografi, sosial, ekonomi, dan politik. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis maka dapat disimpulkan bahwa ada beberapa variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan sehingga tujuan yang ingin dicapai belum terealisasi dengan baik. Pertama, kapasitas implementor terutama dibidang pengawasan masih belum berjalan optimal disebabkan kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh pihak terkait. Kedua, karakteristik dan dukungan kelompok sasaran dimana pengusaha kurang mendukung dikarenakan apabila pengusaha memiliki SIUP maka mereka wajib membayar pajak yang telah ditetapkan sedangkan penghasilan tidak menentu. Ketiga, kondisi lingkungan geografi, sosial, ekonomi, dan politik dimana kondisi lingkungan baik itu geografi, sosial, dan ekonomi masih sangat tinggi pengaruhnya untuk mendukung berjalannya suatu kebijakan di Kecamatan Galing terutama untuk pengusaha yang wajib memiliki SIUP. Saran dari penelitian ini yaitu dari kapasitas implementor terutama dibidang pengawasan harus ditingkatkan lagi dan memberi sanksi kepada pengusaha apabila tidak memiliki SIUP. Kedua karakteristik dan dukungan kelompok sasaran yang mana pengusaha diberi arahan dan sosialisasi tentang pentingnya SIUP. Ketiga dari kondisi lingkungan geografi, sosial, ekonomi dan politik terutama dibidang geografi yang mana pemerintah harus memberikan kemudahan dalam mengurus SIUP.

Kata-kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, SIUP, Pengusaha

THE IMPLEMENTATION OF POLICY ISSUING TRADE LICENSE IN GALING SUBDISTRICT SAMBAS REGENCY

Abstract

The purpose of this research is intend to explain the factors that influence the performance of “the implementation of policy issuing trade license in Galing subdistrict Sambas Regency which is do not run optimally yet. Not optimal implementation of these policies can be seen from the existing problem in the field like there are still many small business in Galing Subdistrict didn’t have the business license from the Sambas Regency Government and the lack of supervision of Sambas Regency Government to the small business that do not have trade license. To analyze the problem occurred, the researcher use the Purwanto and Dyah Ratih Sulistyastuti Theory as the knives analysis. Purwanto and Dyah Ratih Sulistyastuti Theory expected to be able to give an overview and assessment how far the policy implementers implement the objective that had been set for that policy. There are six variables that influence the performance of the implementation according to Purwanto and Dyah Ratih Sulistyastuti which are the policy itself, the adequacy of policy input, the precession of the instrument used to achive the goal, the capacity of the implementor, the characteristic and the support from the target group, the condition of geographic, social, economic, and political environment. Based on the result of the research conducted by the researcher, it can be concluded that ther are some variables affected the performance of the policy implementation so that the goal can’t be realized well. First, the the capacity of the implementator especially in supervision is still not optimal because of the lack of supervision by the related parties. Second the characteristic and the support from the target group where the employers are less supportive because when the employers have the SIUP then they must pay the taxes that have been set meanwhile the income is uncertain. Third, the condition of geographic, social, economic, and political environment where the environmental condition of geographic, social and economic still has many influence in supporting the passage of a policy in Galing Subdistrict especially for the employers which must have the SIUP. The suggestion from this research is from the capacity of the implementor especially in the field of supervision should be enhanced and to penalize the employers which didn’t have the SIUP. Second, characteristic and the support from the target group whre the employers were given advice and dissemination about the importance of SIUP. Third, from the environmental condition of geographic, social, economic and political especially in geographic field, where the government should provides convenience in care of SIUP.

Keywords : Implementation, Policy, Siup, Employers

A. PENDAHULUAN

Surat izin usaha perdagangan seperti yang kita kenal dengan singkatan SIUP yaitu surat izin untuk bisa melaksanakan usaha perdagangan. SIUP wajib dimiliki oleh orang atau badan yang memiliki usaha perdagangan dan berfungsi sebagai alat atau bukti pengesahan dari usaha perdagangan yang dilakukan. SIUP tidak hanya dibutuhkan oleh usaha

berskala besar saja melainkan juga usaha kecil dan menengah agar usaha yang dilakukan mendapatkan pengakuan dan pengesahan dari pihak pemerintah. Hal ini untuk menghindari terjadi masalah yang dapat mengganggu perkembangan usaha dikemudian hari.

SIUP sebagai salah satu jenis izin pada pelayanan satu pintu merupakan salah satu jenis izin yang dibutuhkan oleh kalangan perdagangan, termasuk sektor

usaha kecil dan menengah. Sektor ini merupakan salah satu sektor pemohon yang cukup besar dalam pengurusan Surat izin usaha perdagangan, dan mempunyai peranan besar dalam sistem perekonomian

SIUP dibedakan menjadi 4(empat) jenis yaitu SIUP Mikro, Kecil, Menengah, dan Besar. Adapun keempat jenis SIUP tersebut sebagai berikut ;

a. SIUP Mikro yaitu yang dapat diberikan kepada perusahaan perdagangan mikro, dengan modal dan kekayaan bersih seluruhnya tidak lebih dari Rp.50 juta.

b. SIUP Kecil yaitu wajib dimiliki perusahaan perdagangan dengan modal dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya sebesar Rp.50 juta sampai dengan Rp.500 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

c. SIUP Menengah yaitu wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan dengan modal dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya sebesar Rp.500 juta sampai dengan Rp.10 milyar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

d. SIUP Besar yaitu wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan dengan modal dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya lebih Rp.10 milyar tidak termasuk tempat usaha.

Kegunaan kepemilikan dari SIUP adalah sebagai alat pengesahan yang diberikan oleh pemerintah sehingga dalam

kegiatan usaha tidak terjadi masalah perizinan, selain itu dengan memiliki SIUP dapat memperlancar perdagangan ekspor dan impor dan sebagai syarat untuk mengikuti kegiatan lelang yang diselenggarakan oleh pemerintah. SIUP berlaku selama perusahaan perdagangan menjalankan kegiatan usaha. Perusahaan perdagangan sebagaimana dimaksud wajib melakukan pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun di tempat penerbitan SIUP.

Dalam Pasal 12 Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 46 Tahun 2009 Tentang penerbitan surat izin usaha dikatakan bahwa “Setiap Perusahaan Perdagangan wajib memiliki SIUP”. Petugas penerbit SIUP menerbitkan SIUP paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya SP-SIUP dan dokumen secara lengkap dan benar dan dengan tidak dipungut biaya.

Berdasarkan hasil penelitian awal dilapangan diketahui dari sejumlah 122 usaha perdagangan yang ada di Kecamatan Galing Kabupaten Sambas, baru sebanyak 20 (sekitar 16%), usaha perdagangan yang memiliki SIUP (sumber: Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Sambas dan Kantor Kecamatan Galing).

Hasil pengamatan penulis dilapangan, menunjukkan bahwa para pemilik usaha kecil yang ada di Kecamatan Galing Kabupaten Sambas

banyak yang tidak memiliki izin dari Pemerintah Kabupaten Sambas. Menurut informasi yang peneliti terima dari para pemilik usaha kecil yang tidak memiliki izin, mengatakan bahwa mereka tidak mengetahui kalau usaha kecil itu harus memiliki izin usaha dari Pemerintah Kabupaten Sambas. Lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh pihak pemerintah Kabupaten Sambas dan juga tidak ada upaya untuk menindak lanjuti usaha kecil yang belum memiliki izin resmi dari pihak terkait membuat semakin banyak yang usaha-usaha yang berdiri tidak memiliki izin resmi dari pemerintah Kabupaten Sambas. Berdasarkan permasalahan yang telah penulis paparkan diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti masalah "Implementasi Kebijakan Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) di Kecamatan Galing Kabupaten Sambas".

Berdasarkan latar belakang, menjadi permasalahan dalam implementasi kebijakan penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) di Kecamatan Galing Kabupaten Sambas antara lain adalah (1) masih banyak usaha kecil yang berada di Kecamatan Galing tidak memiliki izin usaha dari pemerintah Kabupaten Sambas, (2) Kurangnya pengawasan dari pemerintah Kabupaten Sambas terhadap usaha kecil yang tidak memiliki izin usaha perdagangan.

Adapun tujuan penelitian ini ialah ingin mengidentifikasi faktor-faktor apa yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) di Kecamatan Galing Kabupaten Sambas

B. KAJIAN TEORI

Implementasi kebijakan berangkat dari berbagai masalah yang harus diatasi oleh pemerintah yang berkaitan dengan publik. Masalah publik bersifat dinamik sehingga penyelesaiannya diperlukan secara menyeluruh (holistic approach) yaitu sebuah pendekatan yang memandang masalah merupakan bagian dari keseluruhan yang tidak dapat dipisahkan atau diukur sendirian. Masalah publik tidak dapat diatasi secara perorangan dan dikehendaki penyelesaian secara efektif dan efisien yang mensyaratkan sebuah proses perumusan masalah dan penetapan kebijakan. Sehubungan dengan proses penetapan kebijakan itu pemerintah mempunyai peran yang memegang posisi dalam proses pembuatan kebijakan menyangkut penyiapan, penentuan, dan menjalankan kebijakan atas nama dan untuk keseluruhan masyarakat daerah dalam kekuasaannya (Nugroho, 2008:302).

Implementasi merupakan suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana diharapkan. Selanjutnya menurut Widodo (2008:91), implementasi kebijakan sebagai “suatu proses melaksanakan keputusan kebijakan”. Sementara Jones dalam Subarsono, (2010:84), mengatakan bahwa implementasi kebijakan merujuk pada pelaksanaan secara efektif, sehingga implementasi kebijakan memuat tentang aktifitas-aktifitas program yang akan dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dan dirasakan manfaatnya oleh kelompok sasaran yang dituju. Menurut Dunn (2003:97), tindakan implementasi kebijakan dapat dibedakan kedalam “policy inputs and policy proses”, lebih lanjut Dunn mengatakan bahwa policy inputs berupa masukan sumber daya, sedangkan policy process bertalian dengan kegiatan administratif, organisasional, yang membentuk transformasi masukan kebijakan ke dalam hasil-hasil. (output) dan dampak kebijakan.

Implementasi kebijakan merupakan suatu proses dalam kebijakan publik yang mengarah pada pelaksanaan kebijakan. Dalam prakteknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks, bahkan tidak jarang bermuatan

politis karena adanya intervensi dari berbagai kepentingan. Implementasi kebijakan merupakan salah satu tahapan dari proses kebijakan publik (public policy process sekaligus studi yang sangat krusial). Bersifat krusial karena bagaimanapun baiknya suatu kebijakan, jika tidak dipersiapkan dan direncanakan secara baik dalam implementasinya, maka tujuan kebijakan tidak akan bisa diwujudkan.

Menurut Dunn (2003:22), proses pembuatan kebijakan merupakan serangkaian tahap yang saling bergantung yang diatur menurut aturan waktu: penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan. Dari serangkaian kegiatan tersebut, pada penelitian ini peneliti lebih mengarah pada tahap implementasi kebijakan. Setelah sebuah kebijakan diformulasikan, tahap selanjutnya ialah implementasi kebijakan. Artinya, jika setiap usulan kebijakan yang telah diputuskan kemudian dilegalkan (disahkan) oleh pihak yang memiliki kewenangan maka keputusan atas kebijakan tersebut telah siap untuk diimplementasikan.

Pihak yang berkewajiban untuk mengimplementasikannya ialah pihak pelaksana dari kebijakan tersebut. Namun demikian, pada tahapan implementasi sebuah kebijakan merupakan tahap krusial

karena merupakan langkah untuk mencapai tujuan kebijakan. Hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh Widodo (2008:85), yakni kalau menghendaki tujuan kebijakan dapat dicapai dengan baik, maka bukan saja pada tahap implementasi yang harus dipersiapkan dan direncanakan dengan baik, tetapi juga pada tahap perumusan atau pembuatan kebijakan juga telah diantisipasi untuk dapat diimplementasikan. Menurut Nugroho (2008:432).

Implementasi kebijakan adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya dan untuk mengimplementasikan kebijakan publik itu ada dua pilihan langkah, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Sementara itu, menurut Agustino (2006:139) implementasi kebijakan menyangkut tiga hal, yaitu: (1) adanya tujuan atau sasaran kebijakan; (2) adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan; (3) adanya hasil kegiatan. Model yang digunakan untuk menganalisis Implementasi Kebijakan Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) di Kecamatan Galing Kabupaten Sambas mengacu pada model implementasi Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti (2012: 85-87), yang menyatakan bahwa kegagalan implementasi yang terjadi di

Indonesia tidak jauh berbeda dengan kegagalan yang ditemukan di negara lain. Setidaknya ada enam faktor yang menjadi penentu berhasil atau tidaknya suatu proses implementasi.

a. Kualitas kebijakan itu sendiri.

Kualitas disini menyangkut banyak hal, seperti: kejelasan tujuan, kejelasan implementor atau penanggung jawab implementasi, dan lainnya. Lebih dari itu, sebagaimana dikatakan oleh Deleon dan Deleon (dalam Agus Purwanto dan Ratih Sulistyastuti, 2012:86) kualitas suatu kebijakan akan sangat ditentukan oleh perumusan kebijakan itu sendiri. Suatu kebijakan yang dirumuskan secara demokratis akan sangat memberikan peluang dihasilkannya kebijakan yang berkualitas. Dengan demikian, sebagaimana dianjurkan oleh Peter dan Linda Deleon sangat penting untuk merumuskan kebijakan melalui proses yang demokratis agar implementasi lebih mudah untuk dilaksanakan.

b. Kecukupan input kebijakan (terutama anggaran).

Suatu kebijakan atau program tidak akan dapat mencapai tujuan atau sasaran tanpa dukungan anggaran yang memadai. Dalam bahasa Wildavsky (Agus Purwanto dan Ratih Sulistyastuti, 2012:86), besarnya anggaran yang dialokasikan terhadap suatu

kebijakan atau program menunjukkan seberapa besar political wil pemerintah terhadap persoalan yang akan dipecahkan oleh kebijakan tersebut. Dengan demikian besarnya anggaran juga dapat dipakai sebagai proxy untuk melihat seberapa besar komitmen pemerintah terhadap kebijakan tersebut. Secara hipotesis dapat dikatakan bahwa semakin besar anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah terhadap suatu kebijakan maka semakin besar pula peluang keberhasilan implementasi kebijakan tersebut. Sebab pemerintah juga memiliki komitmen yang kuat agar kebijakan tersebut mendukung agar implementasi kebijakan tersebut dapat berhasil.

c. Ketepatan instrumen yang dipakai untuk mencapai tujuan kebijakan (pelayanan, subsidi, hibah, dan lainnya).

Dengan analogi suatu penyakit, maka untuk menyembuhkannya diperlukan obat yang tepat, maka untuk menyembuhkannya diperlukan obat yang tepat. Demikian juga persoalan publik yang ingin dipecahkan oleh suatu kebijakan juga memerlukan instrumen yang tepat. Instrumen tersebut berupa pelayanan publik gratis atau dengan memberikan hibah barang-barang tertentu. Tentu setiap persoalan akan membutuhkan bentuk

instrumen yang berbeda-beda. Ketepatan instrumen ini akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi suatu kebijakan.

d. Kapasitas implementor (struktur organisasi, dukungan SDM, koordinasi, pengawasan, dan sebagainya).

Struktur organisasi yang terlalu hirarkis tentu akan menghambat proses implementasi. Kepatuhan para bawahan dalam menjalankan perintah yang diberikan oleh para atasan sebagai upaya untuk melaksanakan suatu kebijakan. Perspektif ini berangkat dari pertanyaan: Apakah implementor mematuhi prosedur yang telah ditetapkan? Apakah pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah disusun? Apakah kelompok sasaran yang dijangkau sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh kebijakan? Apakah implementor tidak melanggar larangan-larangan yang telah dibuat? Perspektif ini sangat dipengaruhi oleh pandangan yang melihat keberhasilan implementasi ditentukan oleh persoalan pengelolaan urusan administrasi dan manajemen.

e. Karakteristik dan dukungan kelompok sasaran.

Karakteristik kelompok sasaran tersebut akan sangat berpengaruh terhadap

dukungan kelompok sasaran terhadap proses implementasi. Untuk menjamin implementasi dapat berjalan dengan lancar, sebelum kegiatan penyampaian berbagai keluaran kebijakan dilakukan kepada kelompok sasaran dimulai perlu didahului dengan penyampaian informasi kepada kelompok sasaran. Tujuan pemberian informasi adalah agar kelompok sasaran memahami kebijakan yang akan diimplementasikan sehingga tidak hanya akan dapat menerima berbagai program diinisiasi oleh pemerintah akan tetapi berpartisipasi aktif dalam upaya untuk mewujudkan tujuan-tujuan kebijakan. Informasi yang disampaikan dalam mencari dukungan terhadap kelompok sasaran ini paling tidak harus mencakup berbagai hal berikut: penjelasan secara lengkap tentang tujuan kebijakan, manfaat serta keuntungan yang akan dirasakan oleh kelompok sasaran, stakeholder yang terlibat, dan mekanisme kegiatan sebuah kebijakan atau program.

- f. Kondisi lingkungan geografi, sosial, ekonomi, dan politik dimana implementasi tersebut dilakukan.

Kebijakan yang berkualitas tidak akan berhasil ketika diimplementasikan dalam situasi dan kondisi lingkungan yang tidak kondusif terhadap upaya pencapaian tujuan kebijakan. Implementasi terjadi dalam suatu wilayah yang di dalamnya

terdapat berbagai faktor, seperti: kondisi geografis, sosial, ekonomi, dan politik yang memiliki kontribusi penting dalam kegiatan implementasi. Diantara faktor tersebut, faktor politiklah yang dianggap memiliki pengaruh yang dominan meskipun pada awalnya variabel politik dianggap kurang penting dalam proses implementasi. Tingginya muatan politik dalam proses implementasi terjadi karena melibatkan banyak stakeholder. Kiviniemi (dalam Agus Purwanto dan Ratih Sulistyastuti, 2012:86) menyebutkan adanya *non governmental actors* yang ikut berinteraksi dalam proses implementasi menjadi sangat dinamis.

Berkaca pada studi di lapangan, implementasi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) ini tidak berjalan dengan baik, karena masih terdapat beberapa persoalan yang masih bertentangan dengan maksud dan tujuan dari kebijakan tersebut. Penyimpangan yang terjadi di luar tujuan kebijakan tersebut seharusnya mendapatkan perhatian dari pihak pemerintah.

Penyimpangan-penyimpangan terhadap tujuan kebijakan yang terjadi merupakan salah satu contoh ketidakberhasilan implementasi kebijakan penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) di Kecamatan Galing Kabupaten Sambas. Penulis mencoba mengkaji dan menggali faktor-faktor yang

mempengaruhi mengapa suatu kebijakan tidak terimplementasi secara baik. Maka dari itu, untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi, penulis menggunakan teori implementasi kebijakan menurut Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti (2012: 85-87), ada enam variabel mempengaruhi kinerja implementasi.

1. Kualitas kebijakan itu sendiri
2. Kecukupan input kebijakan.
3. Ketepatan instrumen yang dipakai untuk mencapai tujuan kebijakan.
4. Kapasitas implementor.
5. Karakteristik dan dukungan kelompok sasaran
6. Kondisi lingkungan geografi, sosial, ekonomi, dan politik dimana implementasi tersebut dilakukan.

Hasil yang diharapkan dari keenam variabel ini, Meningkatnya permohonan perizinan pada berbagai jenis bidang usaha khususnya pada usaha kecil di Kecamatan Galing Kabupaten Sambas.

Kerangka Pikir Penelitian

Implementasi Kebijakan Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) di Kecamatan Galing Kabupaten Sambas

Masalah:

- a. Banyak usaha kecil yang berada di Kecamatan Galing tidak memiliki izin usaha dari pemerintah Kabupaten Sambas.
- b. Kurangnya pengawasan dari pemerintah Kabupaten Sambas terhadap usaha kecil yang tidak memiliki izin usaha perdagangan.

Model Implementasi Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti (2012: 106-110)

1. Kualitas kebijakan itu sendiri
2. Kecukupan input kebijakan
3. Ketepatan instrumen yang dipakai
4. Kapasitas implementor
5. Karakteristik dan dukungan kelompok sasaran
6. Kondisi lingkungan geografi, sosial, ekonomi, dan politik

Meningkatnya permohonan perizinan pada berbagai jenis bidang usaha khususnya pada usaha kecil di Kecamatan Galing Kabupaten Sambas

C. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian eksploratif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Suharsimi Arikunto (2006:7), Penelitian eksploratif adalah penelitian yang bertujuan ingin menggali secara luas tentang faktor-faktor atau yang mempengaruhi terjadinya sesuatu. Asumsi peneliti menggunakan penelitian eksploratif dikarenakan peneliti ingin menggali secara luas tentang faktor-

faktor yang menyebabkan Implementasi Kebijakan Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) di Kecamatan Galing Kabupaten Sambas belum optimal.

Ada beberapa langkah yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini antara lain pra memilih atau menentukan permasalahan penelitian, melakukan pra survey, membuat proposal penelitian yang memasukan unsur rumusan permasalahan, pertanyaan penelitian, memilih pendekatan dan jenis penelitian yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Tempat penelitian yang diteliti oleh penulis adalah di Kecamatan Galing Kabupaten Sambas. Adapun alasan penulis memilih tempat tersebut untuk diteliti seperti yang telah peneliti ungkapkan di latar belakang bahwa adanya permasalahan yang berkaitan dengan Implementasi Kebijakan Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) di Kecamatan Galing Kabupaten Sambas. Permasalahan perizinan di Kecamatan Galing sampai sekarang belum dapat diselesaikan meskipun telah diterbitkan peraturan perundang-undangannya. Untuk itulah penulis menentukan tempat penelitian di Kecamatan Galing Kabupaten Sambas.

Adapun informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kabid Pelayanan Perizinan BPPPT Kabupaten Sambas.

2. Satpol PP Kecamatan Galing

3. Pengusaha di Kecamatan Galing berjumlah 3 orang.

Teknik Pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah wawancara, dokumentasi, dan observasi. Menurut Miles dan Hiberman (Sugiyono:2008;183) terdapat aktivitas dalam analisis data, yang mana aktivitas ini saling berhubungan dalam menganalisa data yang didapat. Jadi pada penelitian ini, dalam menganalisa data menggunakan reduksi data, penyajian data, serta verifikasi. Uji menguji data yang diperoleh dalam penelitian yang sah dan benar maka diperlukan uji kredibilitas. Pada penelitian ini, penulis menggunakan triangulasi untuk menguji keabsahan data. Dalam teknik triangulasi, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama secara serempak.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tahapan implementasi suatu kebijakan merupakan suatu hal yang sangat krusial, dikarenakan tahapan ini akan menentukan keberhasilan atau kegagalan dari implementasi suatu kebijakan. Untuk itulah diperlukan kesiapan yang matang dalam melakukan

implementasi kebijakan tersebut sejak dari tahapan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan sampai dengan pengevaluasian kebijakan tersebut. Pada konteks implementasi kebijakan penulis

Kebijakan merupakan keputusan-keputusan pemerintah yang mempunyai pengaruh penting pada warga masyarakat. Kebijakan yang diambil/dibuat oleh pemerintah dengan tujuan untuk kebaikan dan kesejahteraan rakyatnya. Sebuah kebijakan publik lahir sebagai akibat dari dua hal. Pertama adanya aspirasi dari masyarakat. Kedua berangkat dari niat baik pemerintah untuk mensejahterakan rakyatnya. Dalam perumusan kebijakan publik pemerintah memegang peran sentral yang sangat menentukan. Kebijakan publik yang ditetapkan oleh pemerintah wajib bermanfaat bagi seluruh rakyat, atau minimal sebagian besar dari rakyat.

Kualitas disini menyangkut banyak hal, seperti: kejelasan tujuan, kejelasan implementor atau penanggung jawab implementasi, dan lainnya. Lebih dari itu, sebagaimana dikatakan oleh deleon dan deleon (dalam Agus Purwanto dan Ratih Sulistyastuti, 2012:86) dalam kualitas suatu kebijakan akan sangat ditentukan oleh perumusan kebijakan itu sendiri. Suatu kebijakan yang dirumuskan secara demokratis akan sangat memberikan peluang dihasilkannya kebijakan yang

menggunakan teori Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan implementasi kebijakan.

1. Kualitas kebijakan itu sendiri

berkualitas. Dengan demikian, sebagaimana dianjurkan oleh Peter dan Linda Deleon (dalam Agus Purwanto dan Ratih Sulistyastuti, 2012:86) sangat penting untuk merumuskan kebijakan melalui proses yang demokratis agar implementasi lebih mudah untuk dilaksanakan.

2. Kecukupan input kebijakan

Suatu kebijakan atau program tidak akan dapat mencapai tujuan atau sasaran tanpa dukungan anggaran yang memadai. Dalam bahasa Wildavsky (Agus Purwanto dan Ratih Sulistyastuti, 2012:86), besarnya anggaran yang dialokasikan terhadap suatu kebijakan atau program menunjukkan seberapa besar *political wil* pemerintah terhadap persoalan yang akan dipecahkan oleh kebijakan tersebut. Dengan demikian besarnya anggaran juga dapat dipakai sebagai proxy untuk melihat seberapa besar komitmen pemerintah terhadap kebijakan tersebut. Secara hipotesis dapat dikatakan bahwa semakin besar anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah terhadap suatu kebijakan maka semakin besar pula peluang keberhasilan implementasi kebijakan tersebut. Sebab pemerintah juga memiliki komitmen yang kuat agar kebijakan tersebut dapat berhasil.

3. Ketepatan instrumen yang dipakai

Dengan analogi suatu penyakit, maka untuk menyembuhkannya diperlukan obat yang tepat, maka untuk menyembuhkannya diperlukan obat yang tepat. Demikian juga persoalan publik yang ingin dipecahkan oleh suatu kebijakan juga memerlukan instrumen yang tepat. Dalam ketepatan instrumen terdapat 3 faktor yaitu pelayanan, subsidi, dan hibah. Ketepatan

instrumen ini akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi suatu kebijakan.

4. Kapasitas implementor

Struktur organisasi yang terlalu hirarkis tentu akan menghambat proses implementasi. Kepatuhan para bawahan dalam menjalankan perintah yang diberikan oleh para atasan sebagai upaya untuk melaksanakan suatu kebijakan. Perspektif ini berangkat dari pertanyaan: Apakah implementor mematuhi prosedur yang telah ditetapkan? Apakah pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah disusun? Apakah kelompok sasaran yang dijangkau sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh kebijakan? Apakah implementor tidak melanggar larangan-larangan yang telah dibuat? Perspektif ini sangat dipengaruhi oleh pandangan yang melihat keberhasilan implementasi ditentukan oleh persoalan pengelolaan urusan administrasi dan manajemen. Di dalam kapasitas implementor terdapat 4 poin untuk mencapai berhasil atau tidaknya suatu implementasi yaitu struktur organisasi, dukungan SDM, Koordinasi dan Pengawasan..

5. Karakteristik dan dukungan kelompok sasaran

Karakteristik kelompok sasaran tersebut akan sangat berpengaruh terhadap

dukungan kelompok sasaran terhadap proses implementasi. Untuk menjamin implementasi dapat berjalan dengan lancar, sebelum kegiatan penyampaian berbagai keluaran kebijakan dilakukan kepada kelompok sasaran dimulai perlu didahului dengan penyampaian informasi kepada kelompok sasaran. Tujuan pemberian informasi adalah agar kelompok sasaran memahami kebijakan yang akan diimplementasikan sehingga tidak hanya akan dapat menerima berbagai program diinisiasi oleh Pemerintah akan tetapi berpartisipasi aktif dalam upaya untuk mewujudkan tujuan-tujuan kebijakan. Informasi yang disampaikan dalam mencari dukungan terhadap kelompok sasaran ini paling tidak harus mencakup berbagai hal berikut: penjelasan secara lengkap tentang tujuan kebijakan, manfaat serta keuntungan yang akan dirasakan oleh kelompok sasaran, stakeholder yang terlibat, dan mekanisme kegiatan sebuah kebijakan atau program.

6. Kondisi lingkungan geografi, sosial, ekonomi, dan politik

Kebijakan yang berkualitas tidak akan berhasil ketika diimplementasikan dalam situasi dan kondisi lingkungan yang tidak kondusif terhadap upaya pencapaian tujuan kebijakan. Implementasi terjadi dalam suatu wilayah yang di dalamnya

terdapat berbagai faktor seperti: kondisi geografis, sosial, ekonomi, dan politik.

E. KESIMPULAN

Berikut ini adalah kesimpulan yang dapat penulis kemukakan dari Implementasi Kebijakan Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) di Kecamatan Galing Kabupaten Sambas:

1. Kualitas kebijakan itu sendiri

Bahwa dapat digambarkan bahwa kualitas dari kebijakan itu sendiri sudah cukup baik. Yang mana pengusaha yang berada di Kecamatan Galing sudah mengetahui maksud dari kebijakan yang mewajibkan setiap pengusaha memiliki SIUP.

2. Kecukupan input kebijakan

dimana terkait dengan besaran anggaran yang digunakan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu dalam kebijakan SIUP disesuaikan dengan APBD Kabupaten Sambas.

3. Ketepatan instrumen yang dipakai untuk mencapai tujuan kebijakan

Dibidang pelayanan menunjukkan bahwa pelayanan yang diberikan oleh BPPPT dalam melayani pembuatan

SIUP sudah cukup baik. Namun yang menjadi kendala adalah pengusaha itu sendiri yang tidak mau mengurus SIUP dikarenakan masih terdapat pengusaha yang tidak tahu bagaimana proses pembuatan SIUP.

4. Kapasitas implementor terutama dibidang pengawasan masih belum berjalan dengan optimal karena kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh pihak terkait terhadap pengusaha yang tidak memiliki SIUP dan sanksi yang diberikan hanya berupa teguran.
5. Karakteristik dan dukungan kelompok sasaran
Dimana jarak yang ditempuh untuk mengurus SIUP sangat jauh karena SIUP dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sambas yang letaknya di kabupaten selain itu pengusaha juga kurang mendukung karena apabila pengusaha memiliki SIUP maka mereka wajib membayar pajak yang telah ditetapkan sedangkan penghasilan mereka tidak menentu dan usaha mereka tergolong usaha kecil.
6. Kondisi lingkungan geografi, sosial, ekonomi, dan politik.
Dimana implementasi tersebut dilakukan dimana diketahui bahwa

kondisi lingkungan baik itu geografi, sosial, dan ekonomi masih sangat tinggi pengaruhnya untuk mendukung berjalannya suatu kebijakan di Kecamatan Galing terutama untuk pengusaha yang wajib memiliki SIUP.

F. SARAN

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian ini, penulis memberikan saran agar Implementasi Kebijakan Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) di Kecamatan Galing Kabupaten Sambas menjadi lebih baik.

1. Kapasitas implementor
Kapasitas implementor terutama dibidang pengawasan harus ditingkatkan lagi karena masih terdapat pengusaha yang tidak memiliki SIUP. Untuk kedepannya lebih ditingkatkan lagi dan sanksi yang diberikan kepada pengusaha yang tidak memiliki SIUP harus dipertegas agar jumlah pengusaha yang membuat Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) semakin meningkat dan pengusaha dapat menjalankan usahanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Karakteristik dan dukungan kelompok sasaran

Karakteristik dan dukungan kelompok sasaran terutama pengusaha diberi arahan dan sosialisasi tentang Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) agar pengusaha dapat mendukung program yang telah dibuat oleh Pemerintah.

3. Kondisi lingkungan geografi, sosial, ekonomi, dan politik

Kondisi lingkungan geografi, sosial, ekonomi, dan politik dimana implementasi tersebut dilakukan diketahui bahwa kondisi lingkungan baik itu geografi, sosial dan ekonomi masih sangat tinggi pengaruhnya untuk mendukung berjalannya suatu kebijakan. Dalam hal ini pemerintah selaku pembuat kebijakan harus memberikan solusi kepada pengusaha agar pengusaha dapat membuat Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan tidak ada lagi kegiatan perdagangan yang tidak memiliki izin.

G. KETERBATASAN PENELITIAN

Dari penelitian yang peneliti lakukan di lapangan, hal yang menjadi kendala dan keterbatasan dalam penelitian adalah subjek

penelitian tidak 100 % terbuka secara detail dalam menyampaikan informasi, sehingga dalam melakukan analisis terhadap masalah penulis mengalami kendala. Di samping itu, sulitnya memperoleh data rinci terkait masalah Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) menyebabkan data yang penulis tampilkan dirasakan kurang memadai.

H. REFERENSI

- Agustino, Leo. 2006. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Dunn, William, N. 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Edisi Kedua, Yogyakarta : Gajah Mada University Press,
- Maleong, Lexy J. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, Riant. 2008. Public Policy. Jakarta: PT. Gramedia.
- Purwanto, Erwan Agus, dan Dyah Ratih Suliyastuti, 2012. Implementasi Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gava Media
- Subarsono. 2008. Analisis Kebijakan Publik (Edisi Ketiga) : Konsep, Teori Dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono.2007. Metode Penelitian Administrasi. Bandung: Alfabet.

Sugito,dkk.2011. Pedoman Penulisan Skripsi. Pontianak: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura

Tachjan, H. 2008. Implementasi Kebijakan Publik. Bandung : Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIP) Bekerjasama Dengan Puslit KP2W Lembaga Penelitian Unpad.

Tohardi, Ahmad. 2010. Metode Penelitian Sosial Diktat Kuliah. Pontianak: Universitas Tanjungpura.

Widodo, Joko. 2008. Analisis Kebijakan Publik, Konsep Dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik. Malang : Bayumedia.

Wahab, Solichin Abdul. 2010. Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Bumi Aksara

Sumber lain :

Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 46 Tahun 2009 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha.

Peraturan Bupati Sambas Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati dalam Penandatanganan Perizinan kepada Kepala BPPPT Kabupaten Sambas



LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH / PUBLIKASI
 KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : HENDI
 NIM / Periode lulus : E.01112081 / Periode II
 Tanggal Lulus : 18 November 2016
 Fakultas/ Jurusan : ISIP / Ilmu Administrasi
 Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
 E-mail address/ HP : Provosthendi@gmail.com

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Publika *) pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul**):

Implementasi kebijakan pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) di Kecamatan Galing Kabupaten Sambas

berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/ format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/ mempublikasikannya di Internet atau media lain):

Secara *fulltext*

content artikel sesuai dengan standar penulis jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.



Dibuat di : Pontianak
 Pada tanggal : 5 Desember 2016

NIM. E.01112081

Catatan :

*tuliskan nama jurnal sesuai prodi masing-masing
 (*Publika Governance/Aspirasi/Sociodev/Sosiologique*)

Setelah mendapat persetujuan dari pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author)